SALINAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

Menimbang : a. bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
24. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2022 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
3. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD;
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi, bupati bagi daerah kabupaten, atau wali kota bagi daerah kota.
7. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;

10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; dan
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.977.199.032.621,- yang bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Daerah;
b. Pendapatan Transfer;

Pasal 4

Anggaran Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.76.224.239.905,- yang terdiri atas :

a. Pajak Daerah;
b. Retribusi Daerah;
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pasal 5

(1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp.38.742.054.032,-. yang terdiri atas :
   a. Pajak Hotel sebesar Rp.400.000.000,-.
   b. Pajak Restoran sebesar Rp.1.000.000.000,-.
   c. Pajak Hiburan sebesar Rp.17.850.000,-.
   d. Pajak Reklame sebesar Rp.1.000.000.000,-.
   e. Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp.15.375.000.000,-.
   f. Pajak Parkir sebesar Rp.52.500.000,-.
   g. Pajak Air Tanah sebesar Rp.2.500.000.000,-.
   h. Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp.750.000.000,-.
   i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp.150.000.000,-.
   j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp.5.366.511.406,-.
   k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp.12.130.192.626,-.

(2) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp.4.002.092.200,-. yang terdiri atas :
   a. Retribusi Jasa Umum sebesar Rp.2.880.492.200,-.
   b. Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp.721.600.000,-.
   c. Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp.400.000.000,00,-.

(3) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp.3.030.523.750,-. Yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebesar Rp.3.030.523.750,-

(4) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp.30.449.569.923,-. yang terdiri atas :

a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp.1.162.736.237,-.
b. Jasa Giro sebesar Rp.3.500.000.000,-.
c. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp.2.566.479.462,-.
d. Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp.447.678.224,00,-.
e. Pendapatan BLUD sebesar Rp.15.000.000.000,00,-.
f. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebesar Rp.7.772.676.000,00,-.

Pasal 6

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.856.974.792.716,- yang terdiri atas:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Pasal 7

(1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp.808.658.109.000,- yang terdiri atas :

a. Dana Perimbangan Rp.750.600.544.000,- dan
b. Dana Desa Rp.58.057.565.000,-.

(2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp.48.316.683.716,- yang terdiri atas :

a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp.14.900.412.071,-.
b. Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp.1.595.718.585,-.
c. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp.9.742.380.989,-.
d. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebesar Rp.347.083.130,-.
e. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp.21.731.088.941,-.

Pasal 8

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.974.959.132.621,- yang terdiri atas :

a. Belanja operasional;
b. Belanja modal
c. Belanja tidak terduga; dan
d. Belanja transfer.

Pasal 9

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp.695.310.603.786,- yang terdiri atas :

a. Belanja pegawai;
b. Belanja barang dan jasa;
c. Belanja bunga;
d. Belanja subsidi;
e. Belanja hibah; dan
f. Bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.377.775.085.856,- yang terdiri atas :

a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp.225.738.347.065,-.
b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp.79.319.365.726,-.
c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp.47.054.130.108,-.
d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar Rp.15.544.027.818,-.
e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp.180.357.654,-.
f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebesar Rp.601.699.985,-.
g. Belanja Pegawai BOS Rp.9.337.157.500,-

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.287.704.531.930,-. yang terdiri atas :

a. Belanja Barang sebesar Rp.68.682.507.899,-
b. Belanja Jasa sebesar Rp.125.570.288.943,-
c. Belanja Pemeliharaan sebesar Rp.21.194.599.044,-
d. Belana Perjalanan Dinas sebesar Rp.35.359.486.689,-
e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp.1.374.050.000,-.
f. Belanja Barang dan Jasa BOS Rp.20.523.599.355,-
g. Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp.15.000.000.000,-.

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00,-.

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00,-.

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.29.025.986.000,- yang terdiri atas :

a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp.1.500.000.000,-.
b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp.17.795.416.000,-.
c. Belanja Hibah Dana BOS Rp.8.213.550.000,-.
d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp.1.517.020.000,-.

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.805.000.000,00,- yang terdiri atas Belanja Bantuan Sosial kepada Individu.

Pasal 10

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp.154.593.579.779,- yang terdiri atas :

a. Belanja modal tanah;
b. Belanja modal peralatan dan mesin;
c. Belanja modal bangunan dan gedung;
d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
e. Belanja modal aset tetap lainnya.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,-.

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.35.700.632.326,- yang terdiri atas :

a. Belanja Modal Alat Besar sebesar Rp.1.952.494.200,-
b. Belanja Modal Alat Angkutan sebesar Rp.572.809.265,-

c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebesar Rp.4.890.300,-
d. Belanja Modal Alat Pertanian sebesar Rp264.335.613,-
e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp.3.916.596.210,-
f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemanca sebesar Rp.1.410.309.724,-
g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp.18.224.186.239,-
h. Belanja Modal Alat Laboratorium sebesar Rp.879.471.530,-
i. Belanja Modal Komputer sebesar Rp.3.185.521.887,-
j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian Rp.1.060.000.000,-
k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebesar Rp.97.411.490,-
l. Belanja Modal Peralatan Olahraga Rp.947.568,-.
m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS Rp.4.131.658.300,-

(4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.31.780.842.000,- yang terdiri atas :
a. Belanja Modal Bangunan Gedung sebesar Rp.30.738.842.000,-.
b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp.1.042.000.000,-.

(5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.80.509.530.896,- yang terdiri atas :
a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebesar Rp.64.817.283.896,-.
b. Belanja Modal Bangunan Air sebesar Rp.7.137.368.000,-.
c. Belanja Modal Instalasi Rp.800.000.000,-.
d. Belanja Modal Jaringan Rp.7.754.879.000,-.

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.6.602.574.557,- yang terdiri atas :
a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebesar Rp.34.261.564,-.
b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebesar Rp.49.931.520,-.
c. Belanja Modal Hewan sebesar Rp.67.766.400,-.
d. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Rp.314.650.228,-.
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS Rp.6.135.964.845,-

Pasal 11

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp.5.963.308.133,- yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 12

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp.119.091.640.923,- yang terdiri atas :
a. Belanja bagi hasil; dan
b. Belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.274.414.623,-, yang terdiri atas :
a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebesar Rp.3.874.205.403,-.
b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp.400.209.220,-.

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.114.817.226.300,- yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

Pasal 13

(1) Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.44.000.000.000,- yang terdiri atas :
   a. Penerimaan pembiayaan; dan
   b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 14

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp.44.000.000.000,- yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.44.000.000.000,-

Pasal 15

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp.2.239.900.000,00,- yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah;
(2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.2.239.900.000,00,- Yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pasal 16

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya ~~surplus~~/(defisit) sebesar Rp.41.760.100.000,-.
(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.41.760.100.000,-.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Lampiran I — Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II — Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III — Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV — Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V — Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI — Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII — Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII — Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

9. Lampiran IX — Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

10. Lampiran X — Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 18

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 28 Desember 2022
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd

H. EDIMIN

Diundangkan di Kotapinang
Pada tanggal 28 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

ttd

HERI WAHYUDI M

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 40.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN SETDAKAB

YAKUB ARIFIN, SH, MH.
NIP. 19810112 201101 1 003.

Lampiran I : Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan
Nomor : 40 TAHUN 2022
Tanggal : 28 Desember 2022

KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**76.224.239.905**
4.1.01	Pajak Daerah	38.742.054.032
4.1.01.06	Pajak Hotel	400.000.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	400.000.000
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	400.000.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	1.000.000.000
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	100.000.000
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	100.000.000
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	900.000.000
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	900.000.000
4.1.01.08	Pajak Hiburan	17.850.000
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	17.850.000
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	17.850.000
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	0
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	0
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.000.000.000
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	750.000.000
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	750.000.000
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	200.000.000
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	200.000.000
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	50.000.000
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	50.000.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	15.375.000.000
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	1.000.000.000
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	1.000.000.000
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	14.375.000.000
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	14.375.000.000
4.1.01.11	Pajak Parkir	52.500.000
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	52.500.000
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	52.500.000
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	2.500.000.000
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	2.500.000.000
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	2.500.000.000
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	750.000.000
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	750.000.000
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	750.000.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	150.000.000
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	150.000.000
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	150.000.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	5.366.511.406
4.1.01.15.01	PBBP2	5.366.511.406
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	5.366.511.406
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	12.130.192.626
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	12.130.192.626
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	12.130.192.626
4.1.02	Retribusi Daerah	4.002.092.200
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	2.880.492.200
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	276.000.000
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	276.000.000
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.099.747.200
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.099.747.200
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	55.000.000
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	55.000.000
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	936.360.000
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	267.840.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan
Nomor : 40 TAHUN 2022
Tanggal : 28 Desember 2022

KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	668.520.000
4.1.02.01.07	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	114.485.000
4.1.02.01.07.0001	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	114.485.000
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	98.900.000
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	98.900.000
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	300.000.000
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	300.000.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	721.600.000
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	721.600.000
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	20.000.000
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	701.600.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	400.000.000
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	400.000.000
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	400.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.030.523.750
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	3.030.523.750
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.030.523.750
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.030.523.750
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	30.449.569.923
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.162.736.237
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	1.162.736.237
4.1.04.01.02.0002	Hasil Penjualan Alat Angkutan	1.162.736.237
4.1.04.05	Jasa Giro	3.500.000.000
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.500.000.000
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.500.000.000
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.566.479.462
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.566.479.462
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.566.479.462
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	447.678.224
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	227.984.574
4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	227.984.574
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	219.693.650
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	219.693.650
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	15.000.000.000
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	15.000.000.000
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	15.000.000.000
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	7.772.676.000
4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	7.772.676.000
4.1.04.18.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	7.772.676.000
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**856.974.792.716**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	808.658.109.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	750.600.544.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	75.567.167.000
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	38.868.916.000
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	8.053.042.000
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	485.162.000
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	272.084.000
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	23.622.658.000
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	15.472.000
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	84.593.000
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	1.519.740.000
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1.331.944.000
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.313.556.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	492.029.446.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	492.029.446.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan
Nomor : 40 TAHUN 2022
Tanggal : 28 Desember 2022

KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	61.605.213.000
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	570.643.000
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	11.572.651.000
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	8.470.629.000
4.2.01.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	10.000.000.000
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	534.139.000
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	1.170.000.000
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	6.404.879.000
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	4.762.256.000
4.2.01.01.03.0058	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting	9.152.754.000
4.2.01.01.03.0059	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	773.698.000
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	8.193.564.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	121.398.718.000
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	46.606.930.000
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.735.000.000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	44.643.883.000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	918.000.000
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	3.882.950.000
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	620.000.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	18.433.428.000
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	3.197.982.000
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	318.370.000
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	459.100.000
4.2.01.01.04.0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	583.075.000
4.2.01.05	Dana Desa	58.057.565.000
4.2.01.05.01	Dana Desa	58.057.565.000
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	58.057.565.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	48.316.683.716
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	48.316.683.716
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	48.316.683.716
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	14.900.412.071
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.595.718.585
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	9.742.380.989
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	347.083.130
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	21.731.088.941
	Jumlah Pendapatan	**933.199.032.621**
5	**BELANJA**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**695.310.603.786**
5.1.01	Belanja Pegawai	377.775.085.856
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	225.738.347.065
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	160.389.434.944
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	142.582.403.528
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	17.807.031.416
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	18.705.015.647
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	15.607.446.361
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	3.097.569.286
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.679.356.354
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.652.788.354
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	26.568.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	13.675.271.725
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	10.172.305.725
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	3.502.966.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.064.948.091
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.996.388.091
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	68.560.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan
Nomor : 40 TAHUN 2022
Tanggal : 28 Desember 2022

KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	11.820.391.190
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	9.615.216.125
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2.205.175.065
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	489.381.632
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	470.388.154
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	18.993.478
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	9.267.045
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	8.377.531
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	889.514
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	11.187.336.576
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	11.187.336.576
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	461.040.137
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	400.281.580
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	60.758.557
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.256.903.724
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.088.700.063
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	168.203.661
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	79.319.365.726
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	73.973.937.351
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	71.935.296.327
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	2.038.641.024
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.207.428.375
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.207.428.375
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	4.138.000.000
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	4.138.000.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	47.054.130.108
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	44.643.883.000
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	44.643.883.000
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	918.000.000
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	918.000.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.428.030.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	49.870.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.378.160.000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	64.217.108
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	64.217.108
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	15.544.027.818
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	782.040.000
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	782.040.000
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	109.485.600
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	109.485.600
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	121.665.600
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	121.665.600
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	78.232.000
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	78.232.000
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	121.526.300
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	121.526.300
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	42.492.975
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	42.492.975
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.272.617.228
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.272.617.228
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.102.500.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.102.500.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	686.000.000
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	686.000.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan
Nomor : 40 TAHUN 2022
Tanggal : 28 Desember 2022

KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.430.580.115
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	87.580.115
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	7.000.000
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	8.000.000
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	2.328.000.000
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.615.680.000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.615.680.000
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	47.250.000
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	47.250.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	180.357.654
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	56.939.999
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	56.939.999
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.971.600
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.971.600
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	102.469.536
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	102.469.536
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	9.052.000
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	9.052.000
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.057.279
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.057.279
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	4.600
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	4.600
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	1.375.920
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	1.375.920
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	121.680
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	121.680
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	365.040
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	365.040
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	601.699.985
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.699.985
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.699.985
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	9.337.157.500
5.1.01.88.88	Belanja Pegawai BOS	9.337.157.500
5.1.01.88.88.8888	Belanja Pegawai BOS	9.337.157.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	287.704.531.930
5.1.02.01	Belanja Barang	68.682.507.899
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	68.638.149.611
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	157.799.913
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	37.478.720
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	498.218.024
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	88.617.200
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	100.890.962
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	10.425.570
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	25.568.200
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	213.278.600
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	59.286.133
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	7.552.772
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	4.854.948.587
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	44.039.253
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.281.133.415
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.171.800.875
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.165.496.995
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	138.427.044
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	35.500.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan
Nomor : 40 TAHUN 2022
Tanggal : 28 Desember 2022

KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.175.754.307
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.531.199.017
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.027.222.586
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	36.155.463
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	24.526.807
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	425.099.874
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	298.836.956
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	5.008.111.175
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	69.717.335
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	19.934.849.388
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	3.559.796.548
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	11.819.563.522
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	75.605.404
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.183.337.283
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.752.735.560
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	457.682.721
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	291.684.108
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	105.000.000
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	52.500.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	114.011.832
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	228.947.935
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	23.167.920
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga	10.973.970
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	2.200.952
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.428.343.099
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	110.663.586
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	44.358.288
5.1.02.01.02.0006	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	5.436.180
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	38.922.108
5.1.02.02	Belanja Jasa	125.570.288.943
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	98.365.811.419
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.679.629.760
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.528.884.191
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	391.400.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	99.137.672
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	25.200.000
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	127.500.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	521.500.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	15.847.296.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	18.386.386.070
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	96.000.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	442.300.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	6.373.200.000
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	351.000.000
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	40.800.000
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	691.200.000
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	89.800.000
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	72.000.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	21.081.591
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	6.475.600.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	5.046.000.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.087.582.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	4.108.215.740
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	3.661.200.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.050.850.000
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	36.000.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan
Nomor : 40 TAHUN 2022
Tanggal : 28 Desember 2022

KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	3.112.800.000
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	594.000.000
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	381.600.000
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	110.000.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	66.700.000
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	95.400.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	714.000.000
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	21.687.953
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	379.108.080
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	331.880.454
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	30.000.000
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	199.594.000
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.127.269.810
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	39.600.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	687.283.052
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	17.929.908.212
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	548.600.794
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.187.924.534
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	442.601.222
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	116.090.284
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	11.049.155.429
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	8.693.697.600
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	674.587.200
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	41.994.464
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	864.000.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	587.520.000
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	187.356.165
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	30.000.000
5.1.02.02.03.0007	Belanja Sewa Tanah Persil Lainnya	30.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.526.689.291
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	8.053.600
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	1.464.856.653
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	99.663.800
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	228.117.816
5.1.02.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	299.836.716
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	195.827.800
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	47.866.282
5.1.02.02.04.0125	Belanja Sewa Meja Kerja Pejabat	60.855.418
5.1.02.02.04.0127	Belanja Sewa Kursi Kerja Pejabat	196.793.600
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	481.101.930
5.1.02.02.04.0404	Belanja Sewa Komputer Jaringan	3.910.356
5.1.02.02.04.0406	Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya	266.698.170
5.1.02.02.04.0453	Belanja Sewa Alat Pendukung Pencarian	173.107.150
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.834.781.602
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	332.950.400
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	144.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	680.079.072
5.1.02.02.05.0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	2.560.000
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	93.479.182
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	541.712.948
5.1.02.02.05.0046	Belanja Sewa Rumah Negara dalam Proses Penggolongan	40.000.000
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	34.751.880
5.1.02.02.06.0126	Belanja Sewa Jaringan Listrik Lainnya	34.751.880
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	23.747.200
5.1.02.02.07.0030	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	23.747.200
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.152.733.671

Lampiran I : Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan
Nomor : 40 TAHUN 2022
Tanggal : 28 Desember 2022

KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	2.075.450.000
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	63.710.553
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	300.000.000
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	2.207.019.000
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	18.000.000
5.1.02.02.08.0029	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Parameter Fisikal	89.891.520
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	398.662.598
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	783.848.540
5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	1.000.000
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	114.806.436
5.1.02.02.09.0007	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	3.000.000
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	248.200.000
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	331.342.104
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	85.500.000
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	400.000.000
5.1.02.02.11.0003	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	400.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.368.769.911
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.600.305.800
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	321.745.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	2.446.719.111
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	21.194.599.044
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	210.000.000
5.1.02.03.01.0004	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	210.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.141.526.544
5.1.02.03.02.0002	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader	135.579.030
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	114.536.460
5.1.02.03.02.0009	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	177.394.000
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	169.397.256
5.1.02.03.02.0020	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Feeder	106.398.673
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	167.600.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	5.799.880.000
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	408.210.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	858.400.000
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	811.564.800
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	74.500.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	401.380.000
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	46.431.309
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	12.000.000
5.1.02.03.02.0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	46.335.840
5.1.02.03.02.0195	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	293.522.555
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	2.200.952
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	389.240.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	33.480.000
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	62.616.000
5.1.02.03.02.0442	Belanja Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Alat Bantu Produksi Lainnya	30.859.669
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.143.072.500
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	3.703.072.500
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	2.280.000.000
5.1.02.03.03.0016	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	360.000.000
5.1.02.03.03.0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	800.000.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.700.000.000
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	1.200.000.000
5.1.02.03.04.0010	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	1.650.000.000
5.1.02.03.04.0013	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	100.000.000
5.1.02.03.04.0054	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	150.000.000
5.1.02.03.04.0074	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya	300.000.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan
Nomor : 40 TAHUN 2022
Tanggal : 28 Desember 2022

KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.04.0123	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	300.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	35.359.486.689
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	35.359.486.689
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24.029.333.089
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.330.153.600
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.374.050.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.374.050.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	701.050.000
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	1.800.000
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	671.200.000
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	20.523.599.355
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	20.523.599.355
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	20.523.599.355
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	15.000.000.000
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	15.000.000.000
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	15.000.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	29.025.986.000
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.500.000.000
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1.500.000.000
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1.500.000.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	17.795.416.000
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	16.370.416.000
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.359.000.000
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	7.619.616.000
5.1.05.05.01.0003	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.391.800.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	250.000.000
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	250.000.000
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.175.000.000
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.175.000.000
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	8.213.550.000
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	5.039.800.000
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	5.039.800.000
5.1.05.06.03	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	3.173.750.000
5.1.05.06.03.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	3.173.750.000
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.517.020.000
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.517.020.000
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.517.020.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	805.000.000
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	805.000.000
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	805.000.000
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	805.000.000
5.2	**BELANJA MODAL**	**154.593.579.779**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.700.632.326
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	1.952.494.200
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	1.604.975.400
5.2.02.01.01.0003	Belanja Modal Excavator	1.604.975.400
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	347.518.800
5.2.02.01.03.0002	Belanja Modal Feeder	347.518.800
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	572.809.265
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	494.866.771
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	494.866.771
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	77.942.494
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	77.942.494
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	4.890.300

Lampiran I : Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan
Nomor : 40 TAHUN 2022
Tanggal : 28 Desember 2022

KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	4.890.300
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	4.890.300
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	264.335.613
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	264.335.613
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	264.335.613
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.916.596.210
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	609.301.057
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	381.729.122
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	227.571.935
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3.244.784.550
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	2.845.897.599
5.2.02.05.02.0002	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	4.996.017
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	5.328.622
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	144.302.025
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	123.006.649
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	42.461.838
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	78.791.800
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	62.510.603
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	49.304.888
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	13.205.715
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.410.309.724
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	6.371.178
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	6.371.178
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	3.938.546
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	3.938.546
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	1.400.000.000
5.2.02.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	1.400.000.000
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	18.224.186.239
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	18.223.607.041
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	4.129.716.804
5.2.02.07.01.0003	Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana	390.000.000
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	685.449.842
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	3.382.417.722
5.2.02.07.01.0007	Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	26.653.575
5.2.02.07.01.0011	Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik	947.517.096
5.2.02.07.01.0015	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	123.747.240
5.2.02.07.01.0016	Belanja Modal Alat Kedokteran Patalogi Anatomy	1.358.524.467
5.2.02.07.01.0019	Belanja Modal Alat Kedokteran Nuklir	79.622.679
5.2.02.07.01.0020	Belanja Modal Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	130.400.000
5.2.02.07.01.0021	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	3.006.783.664
5.2.02.07.01.0024	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	3.100.801.212
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	861.972.740
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	579.198
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	579.198
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	879.471.530
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	788.302.325
5.2.02.08.01.0014	Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi	638.302.325
5.2.02.08.01.0064	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	150.000.000
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	91.169.205
5.2.02.08.04.0005	Belanja Modal System/Power Supply	91.169.205
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	3.185.521.887
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	1.027.555.538
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	1.027.555.538
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.157.966.349
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	36.073.542
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	297.070.655

Lampiran I : Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan
Nomor : 40 TAHUN 2022
Tanggal : 28 Desember 2022

KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	199.822.152
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	1.625.000.000
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	1.060.000.000
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	1.060.000.000
5.2.02.13.01.0002	Belanja Modal Sumur Pemboran	960.000.000
5.2.02.13.01.0003	Belanja Modal Sumur Lainnya	100.000.000
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	97.411.490
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	97.411.490
5.2.02.15.02.0001	Belanja Modal Baju Pengaman	52.361.364
5.2.02.15.02.0003	Belanja Modal Topi Kerja	231.680
5.2.02.15.02.0005	Belanja Modal Sepatu Lapangan	44.818.446
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	947.568
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	947.568
5.2.02.19.01.0001	Belanja Modal Peralatan Olahraga Atletik	669.552
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	278.016
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.131.658.300
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.131.658.300
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.131.658.300
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	31.780.842.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	30.738.842.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	30.588.842.000
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	5.000.000.000
5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	5.824.681.000
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	896.000.000
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	500.000.000
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	6.050.000.000
5.2.03.01.01.0016	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	10.415.000.000
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	200.000.000
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.703.161.000
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	150.000.000
5.2.03.01.02.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	150.000.000
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.042.000.000
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	1.042.000.000
5.2.03.04.01.0003	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	75.000.000
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	967.000.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	80.509.530.896
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	64.817.283.896
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	55.517.283.896
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	51.900.000.000
5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	2.047.283.896
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	1.570.000.000
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	9.300.000.000
5.2.04.01.02.0013	Belanja Modal Jembatan Lainnya	9.300.000.000
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	7.137.368.000
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	125.000.000
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	125.000.000
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	600.000.000
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	600.000.000
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	6.412.368.000
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	3.350.000.000
5.2.04.02.07.0006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	3.062.368.000
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	800.000.000
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	800.000.000
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	800.000.000
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	7.754.879.000
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	5.604.879.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan
Nomor : 40 TAHUN 2022
Tanggal : 28 Desember 2022

KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.04.04.01.0004	Belanja Modal Jaringan Sambungan ke Rumah	5.604.879.000
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	2.150.000.000
5.2.04.04.02.0002	Belanja Modal Jaringan Distribusi	2.150.000.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.602.574.557
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	34.261.564
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	34.261.564
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	12.446.970
5.2.05.01.01.0002	Belanja Modal Buku Filsafat	2.551.978
5.2.05.01.01.0003	Belanja Modal Buku Agama	2.230.032
5.2.05.01.01.0004	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	2.257.519
5.2.05.01.01.0005	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	4.967.872
5.2.05.01.01.0006	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	2.586.012
5.2.05.01.01.0007	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	2.688.088
5.2.05.01.01.0008	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	2.275.574
5.2.05.01.01.0009	Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	2.257.519
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	49.931.520
5.2.05.02.03	Belanja Modal Tanda Penghargaan	49.931.520
5.2.05.02.03.0002	Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Lainnya	49.931.520
5.2.05.03	Belanja Modal Hewan	67.766.400
5.2.05.03.02	Belanja Modal Ternak	67.766.400
5.2.05.03.02.0003	Belanja Modal Ternak Unggas	67.766.400
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	314.650.228
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	314.650.228
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	4.170.228
5.2.05.08.01.0006	Belanja Modal Kajian	310.480.000
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	6.135.964.845
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	6.135.964.845
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	6.135.964.845
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**5.963.308.133**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.963.308.133
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	5.963.308.133
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	5.963.308.133
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	5.963.308.133
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**119.091.640.923**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.274.414.623
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	3.874.205.403
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.874.205.403
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.874.205.403
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	400.209.220
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	400.209.220
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	400.209.220
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	114.817.226.300
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	114.817.226.300
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	114.817.226.300
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	114.817.226.300
	Jumlah Belanja	**974.959.132.621**
	Total Surplus/(Defisit)	**(41.760.100.000)**
6	**PEMBIAYAAN**	
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**44.000.000.000**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	44.000.000.000
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	44.000.000.000
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	44.000.000.000
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	44.000.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**44.000.000.000**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**2.239.900.000**

Lampiran I : Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan
Nomor : 40 TAHUN 2022
Tanggal : 28 Desember 2022

KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.239.900.000
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2.239.900.000
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.239.900.000
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.239.900.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**2.239.900.000**
	Pembiayaan Netto	**41.760.100.000**
6.3	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan**	**0**

Bupati Labuhanbatu Selatan
ttd
H. EDIMIN